

Evaluasi Implementasi dan Keputusan Keberlanjutan Kebijakan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagai Ruang Publik di Kawasan Alun-Alun Kota Serang

Rava Kayla Alam¹, Lis Apriyanti², Bilqis Alayda Ramadhanti³, Dzaki Muhammad Yusuf Laorinsya⁴, Riswanda⁵

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

*Corresponding author email: Ravakayla693@gmail.com, lisapiyanti7@gmail.com, bilqisalayda280@gmail.com, *dzakimyl99@gmail.com, riswanda@untirta.ac.id

Article info	Abstrak
Article History: Received: 13 Juni 2026 Accepted: 26 Juni 2026 Published: 30 Juni 2026 Kata Kunci: evaluasi kebijakan; ruang terbuka hijau; ruang publik; Alun-Alun Kota Serang; IPO-O	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai ruang publik di kawasan Alun-Alun Kota Serang serta menganalisis keberlanjutan kebijakan tersebut berdasarkan persepsi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan model evaluasi IPO-O (Input, Process, Output, Outcome) sebagai kerangka analisis. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan masyarakat pengguna Alun-Alun Kota Serang sebagai informan, serta studi dokumentasi dari regulasi dan dokumen resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemanfaatan RTH belum berjalan optimal. Pada aspek input, masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan regulasi teknis. Pada aspek process, sosialisasi, koordinasi antarinstansi, dan pengawasan kawasan belum berjalan efektif sehingga masih ditemukan permasalahan kebersihan, parkir, dan penataan pedagang kaki lima. Pada aspek output, Alun-Alun Kota Serang telah berfungsi sebagai ruang publik yang dimanfaatkan masyarakat untuk rekreasi, olahraga, dan interaksi sosial. Namun, pada aspek outcome, fungsi ekologis RTH belum tercapai secara optimal akibat tingginya aktivitas sosial dan ekonomi di kawasan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemanfaatan RTH di kawasan Alun-Alun Kota Serang masih relevan untuk dilanjutkan dengan perbaikan pada aspek pengelolaan, pengawasan, fasilitas, dan partisipasi masyarakat. Temuan penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan RTH sehingga fungsi sosial dan ekologis dapat berjalan secara seimbang dan berkelanjutan.
DOI:	<i>Abstract</i>
Keywords: Policy evaluation; green open space; public space; Serang City Square; community perception; IPO-O	<i>This study aims to evaluate the implementation of the Green Open Space (GOS) utilization policy as a public space in the Alun-Alun Kota Serang area and to analyze the sustainability of the policy based on community perceptions. The study employed a qualitative approach using a descriptive-analytical method and the IPO-O (Input, Process, Output, Outcome) evaluation model as the analytical framework. Data were collected through field observations, interviews with users of Alun-Alun Kota Serang as informants, and documentation studies from government regulations and official documents. The findings indicate that the implementation of the GOS utilization policy has not been fully optimized. In the</i>

input dimension, limitations were found in human resources, budget allocation, facilities, and technical regulations. In the process dimension, socialization, inter-agency coordination, and area supervision were not carried out effectively, resulting in issues related to cleanliness, parking management, and street vendor arrangement. In the output dimension, Alun-Alun Kota Serang has functioned as an active public space used for recreation, sports, and social interaction. However, in the outcome dimension, the ecological function of the GOS has not been achieved optimally due to the high intensity of social and economic activities within the area. This study concludes that the GOS utilization policy in Alun-Alun Kota Serang remains relevant and should be continued with improvements in management, supervision, facilities, and community participation. The findings provide recommendations for local governments to enhance the effectiveness of GOS management in order to achieve a balanced and sustainable integration of social and ecological functions.

PENDAHULUAN

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu komponen penting dalam pengembangan wilayah perkotaan yang berorientasi pada prinsip keberlanjutan. Keberadaan RTH tidak hanya berperan sebagai penyeimbang ekosistem kota, tetapi juga memiliki fungsi multidimensi yang mencakup aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan estetika. Dari perspektif ekologis, ruang terbuka hijau berperan dalam meningkatkan kualitas udara, menurunkan suhu lingkungan perkotaan, meningkatkan infiltrasi air hujan, serta mendukung keberlanjutan keanekaragaman hayati (Arifin & Nakagoshi, 2011; Rahmy et al., 2012). Di sisi lain, RTH juga memiliki fungsi sosial sebagai ruang publik yang dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan rekreasi, olahraga, interaksi sosial, dan berbagai aktivitas komunitas yang dapat meningkatkan kualitas hidup perkotaan (Chiesura, 2004; Putri et al., 2017). Dengan demikian, keberadaan RTH menjadi salah satu kebutuhan penting dalam mewujudkan kota yang layak huni, sehat, dan berkelanjutan. Kebijakan mengenai penyediaan ruang terbuka hijau telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mewajibkan kawasan perkotaan menyediakan minimal 30% RTH dari total wilayah, yang terdiri atas 20% RTH publik dan 10% RTH privat (Republik Indonesia, 2007). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa RTH tidak hanya diposisikan sebagai bagian dari sistem ekologis, tetapi juga sebagai fasilitas publik yang memiliki kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai hambatan, terutama di wilayah perkotaan yang mengalami tekanan akibat pertumbuhan penduduk dan pesatnya pembangunan infrastruktur.

Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten turut mengalami dinamika perkembangan wilayah yang cukup signifikan. Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun berdampak pada meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas publik, termasuk ruang terbuka hijau yang dapat digunakan untuk aktivitas sosial, rekreasi, maupun olahraga. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk mampu menyediakan ruang publik yang tidak hanya memadai secara kuantitas, tetapi juga berkualitas dalam mendukung aktivitas masyarakat perkotaan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintah Kota Serang telah mengembangkan beberapa kawasan ruang terbuka hijau publik yang tersebar di berbagai titik kota. Keberadaan ruang-ruang tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus menyediakan wadah aktivitas sosial masyarakat yang bersifat inklusif dan terbuka.

Tabel 1.1 Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Serang

No	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas (M ²)
1.	Taman Terminal Pakupatan	3.921
2.	Taman Bina Bangsa	2.227
3.	Taman Tugu Debus	3.200
4.	Taman Median (RS. Sari Asih)	786
5.	Taman Tugu Jam	2.197
6.	Taman Makam Pahlawan	621
7.	Taman Pamkot Lama	1.080
8.	Taman Tugu Adipura	1.262
9.	Taman Lampu Merah Warjok	154
10.	Taman Lampu Merah Kebon Jahe	134
11.	Taman Lampu Merah Ciracas	185
12.	Taman Lampu Merah Sempu	175
13.	Taman Median Sempu (Depan Giant)	1.262
14.	Alun-Alun Barat	18.654
15.	Alun-Alun Timur	25.138
16.	Taman Tugu Selamat Jalan Patung	440
17.	Taman Median Ahmd Yani	2,600
18.	Taman Median Veteran	1,614

No	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas (M ²)
19.	Taman Hutan Kota	12,281
20.	Taman Median Sempu (Jl. Raya Pandeglang)	830
21.	Taman Sari	6,903
22.	Taman Patung Alun-Alun	462
23.	Taman PamkovSerang	2,200
24.	Taman Lampu Merah Cipocok	529
25.	Taman Perumahan RS Pemda	1,074
26.	Taman Perempatan Gerbang Tol Serang Timur	288
27.	Taman Median Jl Jendral Sudirman	1,925
28.	Taaman Median Pertigaan Sempu	477
29.	Taman Median Makam Cibetik	1,833
30.	Taman Stadion Maulana Yusuf	30,206
31.	Taman Bunderan Ciceri	544
32.	Taman Simpang Kopasus	500
33.	Taman Terminal Cipocok	545
34.	Taman Polda	10,000
35.	Hutan Taman Kopasus	1,416,500
36.	Taman Bandeng (Pemkot)	815
37.	Taman Kecamatan Curug	4,786
38.	Taman Kecamatan Kasemen	3,623
39.	Taman Kecamatan Walantaka	6,430
40.	Taman Kecamatan Taktakan	2,249
41.	Taman Kecamatan Cipocok Jaya	1,770
42.	Taman Skateboard (Prisma)	960
43.	Taman Cecantelan (Ex.SD Cijawa)	1,127

Sumber: Serangkota.go.id, 2024.

Berdasarkan tabel 1.1, Alun-Alun Kota Serang merupakan salah satu ruang terbuka hijau publik yang memiliki posisi strategis karena berada di pusat kota serta menjadi salah satu destinasi utama masyarakat. Kawasan ini terdiri atas Alun-Alun Barat dan Alun-Alun Timur yang digunakan untuk berbagai aktivitas, seperti olahraga, rekreasi, kegiatan komunitas, interaksi sosial, hingga penyelenggaraan kegiatan publik. Tingginya tingkat

kunjungan menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki peran penting sebagai ruang publik utama dalam mendukung kehidupan sosial masyarakat perkotaan. Namun demikian, tingginya intensitas pemanfaatan tersebut tidak terlepas dari berbagai permasalahan dalam pengelolaannya. Berdasarkan hasil observasi lapangan serta wawancara dengan pengguna kawasan, ditemukan sejumlah isu yang masih sering muncul, seperti kondisi kebersihan lingkungan, keterbatasan fasilitas umum, pengaturan parkir, serta penataan aktivitas pedagang di area sekitar alun-alun. Seorang driver yang beraktivitas di sekitar lokasi menyampaikan bahwa keterbatasan jumlah tempat sampah menyebabkan penumpukan sampah ketika terjadi lonjakan pengunjung. Selain itu, masyarakat pengguna rutin menilai bahwa fasilitas seperti tempat duduk, toilet umum, dan jalur pedestrian masih membutuhkan peningkatan perawatan agar lebih nyaman digunakan. Sementara itu, pengunjung dari luar daerah menyatakan bahwa kepadatan kendaraan serta sistem parkir yang belum tertata dengan baik sering menurunkan kenyamanan saat berada di kawasan tersebut.

Temuan lapangan tersebut diperkuat oleh berbagai pemberitaan media yang mengangkat isu terkait pengelolaan dan rencana revitalisasi Alun-Alun Kota Serang. Berbagai laporan menunjukkan bahwa pemerintah daerah tengah berupaya melakukan peningkatan kualitas fasilitas serta penataan kawasan guna memperbaiki fungsi alun-alun sebagai ruang publik. Di sisi lain, isu mengenai kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, dan sistem parkir masih menjadi perhatian masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Alun-Alun Kota Serang telah berfungsi sebagai ruang publik yang aktif, pengelolaannya masih memerlukan optimalisasi. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau dengan realitas yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna. Keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan fasilitas fisik, tetapi juga oleh tingkat kenyamanan, kemanfaatan, dan kepuasan pengguna terhadap ruang tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kajian evaluatif untuk menilai efektivitas pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan Alun-Alun Kota Serang. Dalam perspektif kebijakan publik, evaluasi merupakan tahapan penting untuk mengukur sejauh mana suatu kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dunn (2003) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pencapaian tujuan tersebut. Hasil evaluasi ini kemudian dapat menjadi dasar dalam perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Penelitian mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) telah mengalami perkembangan yang cukup luas dengan berbagai fokus kajian. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti peran RTH dari aspek ekologis sebagai upaya menjaga kualitas lingkungan perkotaan. Arifin dan Nakagoshi (2011) serta Rahmy et al. (2012) menjelaskan bahwa keberadaan RTH memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas udara, mengurangi suhu lingkungan, mendukung konservasi sumber daya air, serta menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah perkotaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi ekologis masih menjadi perhatian utama dalam berbagai penelitian yang membahas pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari pembangunan kota yang berkelanjutan.

Di samping fungsi ekologis, sejumlah penelitian juga mengkaji peran RTH sebagai ruang publik yang mendukung kehidupan sosial masyarakat. Hakim & Utomo (2004) menyatakan bahwa ruang terbuka hijau tidak hanya berfungsi sebagai elemen lingkungan, tetapi juga sebagai sarana rekreasi, olahraga, interaksi sosial, dan berbagai aktivitas masyarakat lainnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, tingkat kenyamanan, kemudahan akses, keamanan, serta kualitas fasilitas menjadi faktor penting dalam optimalisasi pemanfaatan RTH sebagai ruang publik. Hal ini menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau memiliki fungsi yang tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga sosial, sehingga pengelolaannya perlu memperhatikan kedua aspek tersebut secara seimbang (Putri et al., 2017; Rigolon, 2016).

Sementara itu, penelitian yang berfokus pada evaluasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau pada umumnya lebih banyak menilai pencapaian target luasan RTH, efektivitas program penghijauan, serta tingkat kesesuaian implementasi kebijakan dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih membahas aspek ekologis dan sosial secara terpisah sehingga belum mampu menjelaskan keterkaitan antara sumber daya yang tersedia, proses pelaksanaan kebijakan, hasil yang dicapai, dan dampak yang ditimbulkan secara menyeluruh. Akibatnya, faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan implementasi kebijakan RTH belum tergambarkan secara komprehensif.

Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian terdahulu, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut. Pertama, penelitian mengenai RTH di Indonesia masih didominasi oleh pembahasan mengenai fungsi ekologis dibandingkan evaluasi pemanfaatannya sebagai ruang publik. Kedua, penelitian mengenai

ruang publik cenderung berfokus pada tingkat kepuasan masyarakat tanpa menghubungkannya dengan proses implementasi kebijakan yang mendasarinya. Ketiga, studi evaluasi kebijakan RTH masih lebih banyak berorientasi pada capaian program atau output, sehingga belum mampu menjelaskan hubungan antara input, process, output, dan outcome secara terpadu. Selain itu, penelitian yang secara khusus mengevaluasi implementasi kebijakan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagai ruang publik di kawasan Alun-Alun Kota Serang masih relatif terbatas, padahal kawasan tersebut merupakan salah satu ruang publik utama yang memiliki peran strategis bagi masyarakat Kota Serang.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini tidak hanya terletak pada lokasi penelitian, yaitu kawasan Alun-Alun Kota Serang, tetapi juga pada pendekatan yang digunakan dalam menganalisis kebijakan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menitikberatkan pada satu aspek tertentu, penelitian ini menggunakan Model IPO-O (*Input, Process, Output, Outcome*) untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau secara lebih komprehensif. Melalui model tersebut, penelitian ini dapat menjelaskan hubungan antara ketersediaan sumber daya sebagai input, proses pelaksanaan kebijakan, hasil yang dicapai, serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat maupun lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi pemanfaatan RTH, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kendala dalam implementasi kebijakan. Kebaruan penelitian ini dibangun atas dasar kebutuhan untuk mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagai ruang publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagai ruang publik di kawasan Alun-Alun Kota Serang dengan menggunakan Model IPO-O (*Input, Process, Output, Outcome*). Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian evaluasi kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi bagi Pemerintah Kota Serang dalam meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan Alun-Alun Kota Serang sehingga fungsi sosial dan ekologisnya dapat berjalan secara seimbang, efektif, dan berkelanjutan.

KAJIAN TEORI

1. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik adalah salah satu tahap krusial dalam siklus kebijakan yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu kebijakan dapat memenuhi tujuan yang telah ditentukan. Evaluasi tidak hanya berfungsi untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan, tetapi juga memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Melalui evaluasi, pemerintah dapat memahami efektivitas pelaksanaan program, tingkat pencapaian sasaran, serta berbagai kendala yang muncul selama proses implementasi.

Dalam penelitian ini menerapkan model IPO-O sebagai dasar evaluasi untuk menilai hubungan antara kesiapan masukan, kualitas proses, hasil keluaran, dan dampak kebijakan penggunaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di area Alun-Alun Kota Serang. Model ini melihat pelaksanaan kebijakan sebagai sebuah sistem yang terhubung, sehingga keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada hasil akhirnya, tetapi juga pada kualitas sumber daya, proses pelaksanaan, hasil yang diperoleh, serta efek yang ditimbulkan bagi masyarakat dan lingkungan. Hubungan antara input, proses, output, dan outcome dipahami sebagai hubungan sebab-akibat yang saling memengaruhi, sehingga perubahan pada satu komponen akan berdampak pada komponen lainnya. Dalam kerangka ini, evaluasi tidak berhenti pada penilaian hasil akhir, tetapi juga menelusuri bagaimana kebijakan dirancang, dilaksanakan, hingga menghasilkan dampak nyata di masyarakat, serta bagaimana hasil tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan secara berkelanjutan melalui mekanisme umpan balik (Riswanda, 2024).

Pandangan mengenai aktivitas evaluasi kebijakan publik sering disamakan pemaknaan dengan kegiatan pemantauan atau monitoring, padahal dalam pemantauan lebih ditekankan pada pembuatan premis – premis faktual dalam kebijakan publik, sedangkan kegiatan evaluasi lebih menekankan pada penciptaan premis – premis nilai yang diperlukan demi menghasilkan informasi tentang kinerja kebijakan (Dunn, 2003). Kemudian, Lester dan Stewart (yang dikutip pada Winarno 2008:166) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan dibagi menjadi dua pekerjaan atau fungsi. Pekerjaan atau fungsi pertama yaitu membuktikan konsekuensi yang terjadi dari sebuah kebijakan dengan mengidentifikasi dampak yang timbul, sementara pekerjaan atau fungsi kedua evaluasi yaitu menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan sesuai standar yang ditetapkan

sebelumnya. Kegiatan evaluasi kebijakan selalu berkaitan dengan cara pengukuran dan penilaian sebuah fakta dari tahap implementasi serta hasilnya atau dampak kebijakan atau program tersebut.

Nugroho (2011:463) mengemukakan terdapat empat fungsi evaluasi kebijakan publik. Pertama, fungsi eksplanasi yang bertujuan menjelaskan hubungan sebab – akibat dalam pelaksanaan kebijakan dengan jelas, sehingga memungkinkan terjadinya generalisasi terkait pola hubungan dari dimensi realitas yang diamati. Kedua, fungsi kepatuhan yang bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku kebijakan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditentukan. Ketiga, fungsi audit dilaksanakan supaya hasil yang diharapkan benar-benar diterima oleh kelompok sasaran dari kebijakan tersebut. Sementara, fungsi keempat yaitu akunting bertujuan mengidentifikasi dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh kebijakan yang telah diimplementasikan.

Lebih lanjut, Riswanda (2024) menekankan bahwa evaluasi kebijakan perlu dilakukan dengan pendekatan kritis dan reflektif, sambil mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan kelembagaan. Dari perspektif ini, evaluasi kebijakan menjadi komponen penting dalam proses dialektika yang bertujuan untuk memahami dinamika kebijakan publik. Dengan kata lain, Riswanda menekankan bahwa evaluasi kebijakan juga merupakan proses "sistemik" yang menerapkan Berpikir Sistemik Kritis dalam menganalisis kebijakan atau program, khususnya dalam konteks penelitian kualitatif modern. Selain itu, dalam kerangka *Smart City* dan tata kelola yang modern, evaluasi, menurut pandangannya, harus melibatkan partisipasi publik yang signifikan, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek, melainkan subjek aktif yang memberikan kontribusi. Dalam perspektif pembangunan perkotaan berkelanjutan, ruang terbuka hijau merupakan bagian dari infrastruktur publik yang mendukung terciptanya kota yang inklusif, sehat, tangguh, dan berkelanjutan (UN-Habitat, 2020).

Secara keseluruhan, penerapan model IPO-O dalam penelitian ini memungkinkan pelaksanaan analisis yang menyeluruh terhadap implementasi kebijakan pemanfaatan RTH sebagai ruang publik. Pendekatan ini memberikan kerangka berpikir yang sistematis dalam menghubungkan antara perencanaan, pelaksanaan, hasil, dan dampak kebijakan, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan yang dikaji. Selain itu, kerangka ini juga membuka ruang bagi formulasi rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap dinamika

perkotaan, khususnya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari pembangunan kota yang berkelanjutan (Riswanda, 2024).

2. Model Evaluasi Kebijakan Berbasis IPO-O Riswanda (2024a; 2024b)

Model evaluasi kebijakan yang menggunakan pendekatan IPO-O berfungsi untuk memahami kebijakan sebagai susunan sistem yang saling berhubungan antara *input*, *process*, *output*, *outcome*, dan umpan balik evaluatif. Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada hasil akhir, tetapi juga pada hubungan antar berbagai aspek yang menyusun proses kebijakan secara menyeluruh. Model ini menilai bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir setelah kebijakannya di implementasikan, tetapi juga bagaimana hubungan yang logis antara kapasitas dasar, proses pelaksanaan, hasil yang diperoleh, hingga dampak yang ditimbulkan, serta umpan balik guna manfaat perbaikan yang berkelanjutan. Pendekatan evaluatif model IPO-O menekankan peran penting hubungan kausal antar dimensi dalam menentukan keberhasilan kebijakan. Dengan begitu, model ini bersifat analitis dan normatif, tidak hanya deskriptif dalam memberikan rekomendasi kebijakan (Riswanda, 2024). Oleh karena itu, model IPO-O memungkinkan evaluasi dapat dilakukan secara komprehensif dibandingkan pendekatan lainnya yang hanya berfokus pada hasil akhir.

a) Dimensi Input (Fondasi Kapasitas Implementasi)

Dimensi input mencerminkan kesiapan struktural dan kapasitas dasar yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan. Evaluasi pada tahap ini bertujuan untuk menilai apakah sumber daya yang tersedia memadai sebelum kebijakan diimplementasikan. Indikator dalam dimensi input meliputi: (1) Regulasi yang mencakup kejelasan dasar hukum, konsistensi norma kebijakan, dan ketersediaan petunjuk pelaksanaan; (2) Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup jumlah, kompetensi, integritas, dan komitmen pelaksana; (3) Anggaran yang meliputi kecukupan, distribusi, dan efektivitas penggunaan dana; (4) Sarana dan Prasarana, yang berupa fasilitas fisik dan sistem pendukung kebijakan; (5) Struktur Organisasi yang mencakup pembagian tugas, SOP, dan mekanisme koordinasi antar unit (Riswanda, 2024). Kriteria dalam dimensi input yang kuat menjadi dasar utama yang mempengaruhi kualitas proses pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, jika dimensi input kurang memadai akan berpotensi menyebabkan masalah daripada hasil yang diinginkan dalam pelaksanaan kebijakan atau program.

b) Dimensi Proses (Implementasi Kebijakan)

Dalam dimensi proses pada pendekatan evaluatif model IPO-O menekankan bagaimana kebijakan dijalankan di lapangan dan sejauh mana kolaborasi antara para aktor berjalan dengan efektif. Tahap ini bertindak sebagai penghubung antara kesiapan struktural dan pencapaian kebijakan. Lebih lanjut, indikator dalam dimensi proses sebagai berikut: (1) Sosialisasi yang mencakup intensitas, metode, dan jangkauan penyampaian informasi kebijakan kepada masyarakat; (2) Koordinasi yang mencakup kerja sama antara lembaga dan aktor kebijakan; (3) Komunikasi yang menekankan kejelasan dan konsistensi informasi kebijakan; (4) Kepatuhan Pelaksana yang berhubungan dengan kesesuaian pelaksanaan dengan SOP; (5) Pengawasan yang mencakup monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut. Pada implementasi kebijakannya jika proses tidak berjalan dengan baik, maka target yang telah ditentukan sebagai pencapaian output akan terhambat meskipun pada input kebijakan atau programnya sudah relatif mencukupi.

c) Dimensi Output (Hasil Langsung Kebijakan)

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pada dimensi proses akan menghasilkan sebuah target yaitu output yang ditentukan sebelumnya. Dimensi output sendiri artinya hasil langsung dari pelaksanaan kebijakan dalam jangka pendek, indikator pada dimensi output ialah: (1) Capaian Program, yaitu tingkat realisasi kegiatan dan target yang ditetapkan; (2) Produk Kebijakan, yaitu layanan publik atau program yang dihasilkan; (3) Ketepatan Sasaran, yaitu kesesuaian penerima manfaat dengan target kebijakan; (4) Sasaran Program, yang mencakup jumlah dan karakteristik penerima manfaat; (5) Pengawasan Output, yang terkait dengan monitoring capaian dan evaluasi pelaksanaan program. Hasil atau Output berfungsi berfungsi sebagai indikator awal dari keberhasilan implementasi, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan dampak kebijakan secara substansial.

d) Dimensi Outcome (Dampak Kebijakan)

Dimensi outcome merupakan dimensi akhir yang menilai dampak dari kebijakan atau program yang diimplementasikan dalam jangka menengah terhadap masyarakat. Evaluasi keberhasilan ruang terbuka hijau juga perlu mempertimbangkan intensitas pemanfaatan masyarakat dan kemudahan akses sebagai indikator keberhasilan kebijakan ruang publik (Xiao et al., 2020). Pada dimensi ini lah yang menjadi indikator utama dalam mengukur efektivitas kebijakan, indikator outcome meliputi: (1) Pergeseran perilaku, mencakup naiknya partisipasi dan kepatuhan warga; (2) Keuntungan sosial dan ekonomi,

seperti terangkatnya taraf hidup dan mutu kehidupan; (3) Kefaktifan, yakni kesesuaian antara target kebijakan dengan realisasi yang didapat; (4) Kebertahanan, yang merujuk pada kemapanan efek dalam jangka menengah. Penjelasan mengenai keluaran menggambarkan persoalan kebijakan yang berpotensi membawa perbaikan berarti dan penting bagi para penerima manfaat (Riswanda, 2024).

e) Umpan Balik Evaluatif (*Feedback* Keberlanjutan Kebijakan)

Penjelasan perihal metode penilaian rancangan IPO-O buatan Riswanda memaparkan berbagai keunggulan, satu yang terdepan adalah sifatnya yang saling terkait dan berulang, dengan hasil penilaian pada tahapan keluaran dan hasil dimanfaatkan guna memperbaiki unsur masukan dan jalannya. Umpan balik ini memfasilitasi penyesuaian kebijakan agar mampu menjawab pergeseran kebutuhan publik dan situasi penerapan. Di samping itu, pembahasan tentang penilaian kebijakan tidak sekadar berpusat pada evaluasi, melainkan juga sebagai lanjutan dalam pembentukan kebijakan yang bersumber dari data, melibatkan banyak pihak, lentur, dan tertuju pada hasil (Riswanda, 2024b).

3. Ruang Terbuka Hijau sebagai Ruang Publik

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah elemen penting dalam perencanaan kota yang berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTH didefinisikan sebagai area yang memperluas atau berkumpul yang memiliki fungsi terbuka dan didominasi oleh vegetasi, baik yang tumbuh secara alami maupun yang ditanam secara sengaja. Di area perkotaan, keberadaan RTH berperan strategis dalam mempertahankan kualitas lingkungan sekaligus menyediakan ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat.

Sebagai ruang publik, RTH tidak hanya berfungsi sebagai elemen ekologis, tetapi juga sebagai tempat untuk interaksi sosial. Ruang publik merupakan area yang dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan seperti rekreasi, olahraga, interaksi sosial, aktivitas komunitas, dan kegiatan budaya. Keberadaan ruang publik yang memadai menjadi salah satu indikator kualitas hidup masyarakat di perkotaan karena menyediakan ruang bersama yang dapat memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan kenyamanan lingkungan kota.

Dalam konteks perkotaan yang modern, peran RTH telah meluas tidak hanya sebagai tempat konservasi lingkungan, tetapi juga sebagai ruang sosial yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Alun-alun kota, taman kota, jalur hijau, dan

ruang terbuka lainnya berfungsi sebagai lokasi bagi aktivitas masyarakat dengan nilai sosial yang tinggi. Oleh karena itu, pengelolaan RTH harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ekologis dan kebutuhan sosial masyarakat.

a) Fungsi Ekologis Ruang Terbuka Hijau

Dalam konteks Ruang Terbuka Hijau (RTH), evaluasi terhadap kebijakan harus mempertimbangkan dua fungsi utama yang perlu berjalan secara berimbang, yaitu fungsi ekologis dan fungsi sosial. Fungsi ekologis berkaitan dengan kemampuan RTH menjaga kualitas udara, meningkatkan infiltrasi air, menurunkan suhu mikroklimat, serta mempertahankan keseimbangan ekosistem perkotaan. Selain memberikan manfaat lingkungan, kualitas dan pemerataan akses terhadap ruang hijau juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat dan keadilan lingkungan (Wolch et al., 2014).

Kehadiran vegetasi di RTH berkontribusi pada peningkatan kualitas udara. Selain itu, ruang terbuka hijau berperan sebagai bentuk adaptasi perubahan iklim perkotaan melalui pengurangan suhu permukaan, peningkatan infiltrasi air, dan pengurangan risiko banjir (Kabisch et al., 2017), serta keseimbangan lingkungan yang semakin terganggu oleh perkembangan pembangunan. Lebih jauh, keberadaan RTH berperan dalam meningkatkan kenyamanan mikroklimat dan mengurangi dampak dari urbanisasi. Oleh karena itu, fungsi ekologis menjadi salah satu indikator krusial dalam menilai keberhasilan pengelolaan ruang terbuka hijau.

b) Fungsi Sosial Ruang Terbuka Hijau

Sementara itu, fungsi sosial menjelaskan tentang penggunaan RTH menjadi ruang interaksi masyarakat yang dimanfaatkan untuk rekreasi, olahraga, komunikasi sosial, dan berbagai kegiatan komunitas. Keberadaan ruang hijau juga berkontribusi terhadap meningkatnya kohesi sosial, kesehatan masyarakat, serta kualitas hidup perkotaan karena menyediakan ruang interaksi yang inklusif bagi berbagai kelompok masyarakat (Hakim & Utomo, 2004; Rahmy et al., 2012; Jennings & Bamkole, 2019). Organisasi Kesehatan Dunia juga menegaskan bahwa ruang hijau perkotaan berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan fisik, kesehatan mental, serta kesejahteraan masyarakat perkotaan (*World Health Organization*, 2017).

Sebagai ruang publik, RTH berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan ruang interaksi yang aman, nyaman, dan mudah diakses. Keberadaan ruang publik yang aktif dapat memperkuat kohesi sosial, meningkatkan rasa

memiliki terhadap lingkungan, serta mendukung terciptanya kehidupan perkotaan yang lebih inklusif.

c) Keseimbangan Fungsi Ekologis dan Fungsi Sosial

Dalam konteks RTH, evaluasi kebijakan perlu memperhatikan dua fungsi utama yang harus berjalan seimbang, yaitu fungsi ekologis dan fungsi sosial. Keseimbangan tersebut merupakan karakter utama ruang hijau perkotaan yang bersifat multifungsi sehingga keberhasilan pengelolaannya tidak hanya diukur dari luas vegetasi, tetapi juga manfaat sosial yang diterima masyarakat (Hansen et al., 2019). Fungsi ekologis berkaitan dengan kemampuan RTH dalam menjaga kualitas lingkungan, menyediakan vegetasi, menyerap air, mengurangi panas lingkungan, dan meningkatkan kenyamanan iklim. Di sisi lain, fungsi sosial berkaitan dengan pemanfaatan ruang oleh masyarakat untuk kegiatan rekreasi, olahraga, interaksi sosial, aktivitas ekonomi, dan kegiatan publik.

Kebijakan penggunaan RTH dapat dianggap berhasil apabila kedua fungsi tersebut tidak saling meniadakan. Jika fungsi sosial terlalu dominan tanpa pengendalian, maka fungsi ekologis dapat menurun disebabkan oleh berkurangnya vegetasi, meningkatnya sampah, kerusakan fasilitas, dan tekanan terhadap lingkungan. Sebaliknya, jika fungsi ekologis dijaga tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, maka RTH berisiko tidak menjadi ruang publik yang aktif dan kurang dimanfaatkan oleh warga.

Keberhasilan kebijakan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat berjalan dengan optimal jika dua fungsi, yaitu ekologis dan sosial mampu berjalan secara seimbang juga. Karena disaat fungsi sosial berkembang secara dominan tanpa pengendalian yang tepat, fungsi ekologis berpotensi menurun akibat tekanan yang meningkat pada lingkungan. Sebaliknya, jika pengelolaan hanya difokuskan pada aspek ekologis tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat, maka RTH berisiko kehilangan perannya sebagai ruang publik.

Dengan demikian, keberadaan RTH tidak hanya memenuhi kebutuhan ruang publik masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan kota (urban resilience) terhadap berbagai tantangan lingkungan di masa depan (Meerow & Newell, 2017). Oleh karena itu, dalam penelitian ini keseimbangan antara kedua fungsi tersebut merupakan indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan pemanfaatan RTH di kawasan Alun-Alun Kota Serang.

METODE

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian pada Evaluasi Implementasi Dan Terminasi Kebijakan Publik Tentang Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Ruang Publik Di Kawasan Alun-Alun Kota Serang menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Desain jenis penelitian ini dipilih karena metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan mengkaji secara mendalam yang menggunakan hasil observasi dan fakta aktual dalam implementasi kebijakan pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik di kawasan Alun-Alun Kota Serang. yang menekankan analisis dialektif pada dimensi input, process, output, outcome dari sebuah kebijakan. Penggunaan desain penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendeskripsikan fenomena serta hubungan kausal antar dimensi, hingga kelemahan (*bottleneck*) yang ditemukan pada implementasi kebijakan yang ada.

2. Lokasi, Unit Analisis, dan Periode Kajian

Penelitian ini fokus dilakukan pada satu tempat di kawasan Alun-Alun Kota Serang sebagai salah satu ruang terbuka hijau dan sekaligus taman kota yang dimanfaatkan sebagai ruang publik oleh masyarakat. Objek atau unit analisis yang diteliti dalam penelitian ini adalah kebijakan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang, hingga aktor pelaksana kebijakan dan pengguna ruang yaitu masyarakat sebagai target sasaran penelitian. Periode analisa kebijakan dilakukan dari rentang waktu 2024–2025 yang juga dibatasi pada aspek implementasi kebijakan dan dimensi IPO-O hingga dampak pada pemanfaatan ruang terbuka hijau. Analisa tidak dilakukan secara mendalam pada tahap perumusan kebijakan melainkan fokus pada evaluasi implementasi kebijakannya.

3. Sumber Data Dan Teknik

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengambil data yang diambil dari beberapa cara, sebagai berikut:

(1) Bukti Lapangan, data yang diambil di lapangan berupa hasil observasi lokasi secara langsung di kawasan Alun-Alun Kota Serang. Observasi dilakukan dengan memperhatikan kondisi vegetasi, kebersihan, tempat sampah, tempat duduk, toilet, area parkir, aktivitas pedagang kaki lima, serta intensitas penggunaan ruang oleh masyarakat.

Adapun pengumpulan data penelitian yang dilakukan melalui wawancara terhadap empat informan yang terdiri atas pengguna kawasan dan masyarakat sekitar Alun-Alun Kota Serang, dengan rincian sebagai berikut: I1 (pengemudi ojek *online* yang beraktivitas di kawasan), I2 (warga yang bermukim di sekitar Alun-Alun), I3 dan I4 (warga pendatang atau pengunjung kawasan). Informan dipilih secara *purposive* dan *accidental*, yaitu berdasarkan keterkaitan dengan pemanfaatan kawasan serta keberadaan informan di lokasi penelitian pada saat observasi. Perlu dicatat bahwa penelitian ini tidak berhasil memperoleh informan dari pihak pengelola RTH atau dinas terkait; keterbatasan ini berpengaruh pada kedalaman analisis dimensi *input* dan *process*, sehingga temuan pada kedua dimensi tersebut lebih bersifat indikatif dan memerlukan penelitian lanjutan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali persepsi masyarakat mengenai kenyamanan, kebersihan, keamanan, fasilitas, parkir, dan fungsi ekologis kawasan.

(2) Data Sekunder, berbagai data sekunder diambil dari regulasi penataan ruang, data RTH Kota Serang, data kependudukan, dokumen regulasi yang membahas terkait ruang terbuka hijau (Perda/Perwal Kota Serang), SOP jika tersedia, Laporan Kinerja Instansi, serta dokumen resmi pemerintah yang relevan.

4. Teknik Analisis dan Validitas

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis menggunakan model IPO-O sebagai kerangka dasar. Proses analisis dilakukan melalui langkah-langkah berikut: (1) Mengidentifikasi kondisi pada masing-masing dimensi (*input*, *process*, *output*, *outcome*); (2) Menganalisis hubungan kausal antar dimensi; (3) Mengidentifikasi *bottleneck* atau titik lemah dalam pelaksanaan kebijakan; (4) Membandingkan kondisi ideal dengan keadaan di lapangan; (5) Menarik kesimpulan evaluatif berbasis bukti; (6) Memutuskan kebijakan, yaitu apakah kebijakan tersebut akan dilanjutkan, diperbaiki, didesain ulang, atau dihentikan.

Validitas data dijaga melalui triangulasi antara observasi, wawancara, dan dokumen. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan terkait akses data lapangan dan jumlah responden, khususnya tidak terwakilinya informan dari unsur pengelola atau dinas terkait. Oleh karena itu, temuan pada aspek *outcome* lebih bersifat indikatif dan memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memperkuat bukti empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1. Kondisi Ruang Terbuka Hijau dan Fasilitas Publik di Kawasan Alun-Alun Kota Serang



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026.

Hasil observasi menunjukkan bahwa Alun-Alun Kota Serang masih menjadi salah satu ruang publik yang cukup aktif dimanfaatkan masyarakat. Keberadaan pepohonan, area terbuka, jalur pedestrian, serta berbagai fasilitas pendukung menjadikan kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial bagi masyarakat Kota Serang. Pada waktu-waktu tertentu, terutama sore hari dan akhir pekan, kawasan ini dipadati pengunjung yang datang untuk berolahraga, bersantai, maupun berkumpul bersama keluarga.

Namun demikian, kondisi fisik yang terlihat di lapangan tidak sepenuhnya menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan telah berjalan optimal. Dari hasil observasi masih ditemukan beberapa persoalan yang berkaitan dengan kebersihan, kondisi fasilitas umum, penataan parkir, serta aktivitas pedagang kaki lima. Temuan tersebut kemudian diperkuat melalui hasil wawancara dengan masyarakat yang secara langsung memanfaatkan kawasan Alun-Alun Kota Serang.

Salah seorang pengunjung mengungkapkan bahwa persoalan sampah masih sering dijumpai ketika jumlah pengunjung meningkat.

“Kalau hari biasa masih cukup bersih, tetapi kalau akhir pekan sering terlihat sampah berserakan karena tempat sampah yang tersedia tidak mencukupi.”
(Informan 1, Pengunjung)

Sementara itu, informan lain menyoroti kondisi fasilitas umum yang menurutnya masih perlu mendapat perhatian.

“Toiletnya tersedia, tetapi kebersihannya kadang kurang terjaga sehingga sebagian pengunjung merasa kurang nyaman menggunakannya.” (Informan 2, Warga Sekitar)

Keluhan lain berkaitan dengan ketertiban kawasan, khususnya mengenai parkir kendaraan dan aktivitas perdagangan.

“Masih ada kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya sehingga membuat kawasan terlihat kurang tertib.” (Informan 3, Pengunjung). “Pedagang memang membantu kebutuhan pengunjung, tetapi kalau jumlahnya terlalu banyak kadang membuat area tertentu menjadi sempit dan kurang rapi.” (Informan 4, Pengunjung)

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih merasakan manfaat keberadaan alun-alun sebagai ruang publik. Akan tetapi, masyarakat juga memiliki harapan agar kualitas pengelolaan kawasan dapat ditingkatkan sehingga fungsi ruang terbuka hijau tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi juga dirasakan melalui kenyamanan penggunaannya.

Dimensi Input

Berdasarkan hasil penelitian, aspek input menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Serang telah memiliki dasar regulasi yang mengatur keberadaan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari pembangunan perkotaan. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk menyediakan ruang publik yang dapat diakses masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan kota.

Meski demikian, apabila dicermati lebih jauh, keberadaan regulasi belum secara otomatis menjamin kualitas implementasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa persoalan yang mengindikasikan belum optimalnya dukungan sumber daya yang dimiliki. Misalnya, belum ditemukan informasi yang jelas mengenai jumlah petugas yang bertanggung jawab terhadap kebersihan kawasan, pemeliharaan fasilitas, maupun pengawasan aktivitas pengunjung.

Kondisi tersebut menjadi menarik karena persoalan yang paling sering dikeluhkan masyarakat justru berkaitan dengan aspek-aspek yang sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia dan dukungan operasional. Dengan kata lain, masalah kebersihan, fasilitas, dan ketertiban yang muncul di lapangan kemungkinan bukan hanya disebabkan oleh perilaku masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas pengelolaan yang tersedia.

Selain itu, penelitian ini juga belum menemukan adanya informasi yang memadai mengenai standar operasional pengelolaan kawasan, terutama yang berkaitan dengan penataan aktivitas ekonomi, pengawasan parkir, serta mekanisme pemeliharaan fasilitas

publik. Akibatnya, implementasi kebijakan berpotensi berjalan berdasarkan kebutuhan sesaat tanpa didukung pedoman teknis yang kuat.

Dimensi Process

Jika dibandingkan dengan dimensi lainnya, aspek process menjadi bagian yang paling memperlihatkan berbagai persoalan implementasi. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya keluhan masyarakat yang relatif sama terkait kebersihan, fasilitas umum, parkir, maupun penataan pedagang kaki lima. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan belum berjalan sepenuhnya efektif. Sebagian informan bahkan mengaku tidak mengetahui secara jelas aturan yang mengatur pemanfaatan kawasan Alun-Alun Kota Serang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sosialisasi kebijakan kepada masyarakat belum dilakukan secara optimal. Menariknya, berbagai persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan perilaku pengunjung, tetapi juga menunjukkan adanya tantangan dalam proses koordinasi dan pengawasan. Sebagai contoh, persoalan parkir yang tidak tertata dan keberadaan pedagang pada area tertentu terus muncul meskipun kawasan ini telah lama difungsikan sebagai ruang publik. Apabila dicermati lebih lanjut, kondisi tersebut mengarah pada dugaan bahwa koordinasi antaraktor yang terlibat dalam pengelolaan kawasan belum berjalan secara maksimal. Dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh satu instansi, melainkan memerlukan keterlibatan berbagai pihak yang memiliki fungsi berbeda. Ketika koordinasi tidak berjalan optimal, maka berbagai persoalan di lapangan cenderung muncul secara berulang.

Hal yang sama juga terlihat pada aspek pengawasan. Berulangnya keluhan masyarakat mengenai kebersihan, fasilitas, dan ketertiban kawasan menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan masih bersifat reaktif. Artinya, tindakan sering kali dilakukan setelah masalah muncul, bukan melalui langkah pencegahan yang berkelanjutan.

Dimensi Output

Meskipun berbagai persoalan masih ditemukan dalam proses implementasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemanfaatan ruang terbuka hijau tetap menghasilkan output yang cukup nyata. Alun-Alun Kota Serang berhasil menjadi salah satu ruang publik yang aktif dimanfaatkan oleh masyarakat.

Hampir seluruh informan mengakui bahwa kawasan ini memberikan manfaat bagi aktivitas sehari-hari masyarakat.

“Kalau sore atau akhir pekan tempat ini ramai. Banyak yang olahraga, jalan santai, atau sekadar berkumpul bersama keluarga.” (Informan 1, Pengunjung)

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan alun-alun telah berhasil menjawab kebutuhan masyarakat terhadap ruang publik yang mudah diakses. Tingginya aktivitas masyarakat juga menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak berhenti pada tataran administratif, tetapi telah menghasilkan keluaran yang dapat dirasakan secara langsung.

Akan tetapi, output yang berhasil dicapai belum sepenuhnya diikuti oleh kualitas pelayanan yang memadai. Keberhasilan menghadirkan ruang publik belum secara otomatis menghasilkan tingkat kenyamanan yang tinggi bagi pengguna. Hal ini terlihat dari masih adanya keluhan mengenai kondisi toilet, tempat sampah, area parkir, dan fasilitas pendukung lainnya.

Dengan demikian, output kebijakan dapat dikatakan berhasil dari sisi penyediaan ruang publik, tetapi masih memerlukan peningkatan dari sisi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dimensi Outcome

Pada dimensi outcome, dampak yang paling mudah terlihat adalah meningkatnya fungsi sosial kawasan Alun-Alun Kota Serang. Ruang terbuka hijau tidak hanya dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial. Salah satu informan menyampaikan bahwa kawasan ini menjadi tempat berkumpul yang cukup penting bagi masyarakat.

“Di sini masyarakat dari berbagai kalangan bisa berkumpul. Anak-anak bermain, orang tua berolahraga, dan komunitas juga sering mengadakan kegiatan.”
(Informan 2, Warga Sekitar)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan telah menghasilkan manfaat sosial yang cukup signifikan. Keberadaan ruang publik memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang sebelumnya mungkin sulit dilakukan apabila ruang tersebut tidak tersedia. Namun demikian, manfaat sosial tersebut ternyata juga menghadirkan tantangan tersendiri. Tingginya aktivitas masyarakat berdampak pada meningkatnya tekanan terhadap kualitas lingkungan kawasan.

“Kalau terlalu ramai biasanya sampah bertambah dan area parkir menjadi lebih padat sehingga kurang nyaman.” (Informan 3, Pengunjung)

Temuan ini menunjukkan adanya paradoks dalam implementasi kebijakan. Di satu sisi, tingginya jumlah pengunjung dapat dipandang sebagai indikator keberhasilan karena masyarakat memanfaatkan ruang publik yang tersedia. Akan tetapi, di sisi lain, meningkatnya aktivitas tersebut juga dapat mengurangi kualitas lingkungan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang memadai.

Oleh karena itu, outcome kebijakan belum sepenuhnya mencapai kondisi ideal. Fungsi sosial telah berkembang cukup baik, tetapi fungsi ekologis ruang terbuka hijau masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian.

Sintesis Evaluasi IPO-O

Berdasarkan hasil evaluasi, terlihat bahwa persoalan yang muncul dalam pemanfaatan Alun-Alun Kota Serang tidak dapat dipisahkan antara satu dimensi dengan dimensi lainnya. Keterbatasan pada aspek input berpengaruh terhadap kualitas proses implementasi. Proses yang belum berjalan optimal kemudian memengaruhi kualitas output yang dihasilkan. Pada akhirnya, kondisi tersebut berdampak pada outcome kebijakan yang belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama sebenarnya bukan terletak pada keberadaan ruang terbuka hijau itu sendiri. Masyarakat justru memanfaatkan kawasan ini secara aktif dan menganggapnya penting dalam kehidupan sehari-hari. Persoalan yang muncul lebih banyak berkaitan dengan tata kelola kawasan, terutama pada aspek pemeliharaan fasilitas, kebersihan, pengawasan, dan pengaturan aktivitas pengunjung.

Dengan demikian, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari tingginya jumlah pengunjung atau banyaknya aktivitas yang berlangsung di kawasan alun-alun. Keberhasilan juga harus dilihat dari kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi ekonomi, dan fungsi ekologis ruang terbuka hijau secara berkelanjutan.

Diskusi Temuan

1. Dominasi Fungsi Sosial dibandingkan Fungsi Ekologis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi sosial Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Alun-Alun Kota Serang berkembang lebih kuat dibandingkan fungsi ekologisnya. Kondisi ini terlihat dari tingginya intensitas pemanfaatan kawasan oleh masyarakat untuk kegiatan olahraga, rekreasi, berkumpul bersama keluarga, serta aktivitas komunitas. Posisi alun-alun yang berada di pusat kota menjadikannya mudah dijangkau dan menjadi salah satu ruang publik utama yang tersedia bagi masyarakat.

Di sisi lain, fungsi ekologis belum memperoleh perhatian yang sama kuatnya dalam praktik pengelolaan kawasan. Pemanfaatan ruang yang lebih berorientasi pada aktivitas sosial menyebabkan aspek lingkungan cenderung berada pada posisi sekunder. Akibatnya, keberadaan vegetasi dan fungsi ekologis lainnya belum mampu memberikan

dampak yang optimal terhadap kualitas lingkungan kawasan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan RTH sebagai ruang publik tidak selalu diikuti oleh keberhasilan dalam menjaga fungsi ekologisnya. Dengan kata lain, tingginya tingkat kunjungan masyarakat justru dapat menjadi tekanan bagi keberlanjutan lingkungan apabila tidak disertai pengelolaan yang memadai.

2. Keterkaitan Input dan Process terhadap Belum Tercapainya Outcome Ekologis

Analisis model IPO-O menunjukkan bahwa belum optimalnya outcome ekologis memiliki hubungan yang erat dengan kelemahan pada dimensi input dan process. Pada aspek input, masih ditemukan keterbatasan berupa belum tersedianya pedoman teknis yang lebih spesifik, kurang jelasnya kapasitas kelembagaan pengelola, serta terbatasnya dukungan sarana dan sumber daya yang mendukung pemeliharaan kawasan. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum memiliki fondasi yang cukup kuat.

Kelemahan pada aspek input kemudian berpengaruh terhadap dimensi process. Sosialisasi aturan pemanfaatan kawasan belum berjalan secara merata, pengawasan terhadap aktivitas pengunjung masih belum konsisten, dan koordinasi antaraktor pengelola belum sepenuhnya terintegrasi. Dampaknya terlihat pada munculnya berbagai persoalan seperti sampah, ketidaktertiban parkir, serta aktivitas ekonomi yang belum tertata secara optimal. Situasi tersebut menunjukkan adanya hubungan kausal antara lemahnya kapasitas awal kebijakan dengan rendahnya kualitas implementasi di lapangan. Akibatnya, outcome yang dihasilkan lebih banyak berupa manfaat sosial, sedangkan tujuan ekologis belum tercapai secara seimbang.

3. Implikasi bagi Desain Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan

Temuan penelitian ini memberikan implikasi bahwa kebijakan pengelolaan RTH perkotaan tidak dapat hanya berfokus pada penyediaan ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Desain kebijakan juga harus mampu menjaga keseimbangan antara fungsi sosial dan fungsi ekologis secara bersamaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan pendekatan pengelolaan yang lebih integratif melalui penguatan regulasi teknis, penataan zonasi kawasan, peningkatan fasilitas pendukung lingkungan, serta pengawasan yang berkelanjutan.

Selain itu, partisipasi masyarakat perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam pengelolaan RTH. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai pengguna ruang, tetapi juga sebagai aktor yang ikut menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan kawasan. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan RTH tidak hanya diukur dari tingginya jumlah

pengunjung, melainkan juga dari kemampuan kebijakan dalam mempertahankan kualitas lingkungan secara berkelanjutan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa evaluasi kebijakan RTH perlu melihat keterhubungan antara dimensi sosial dan ekologis sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Keputusan Evaluatif: Keberlanjutan Kebijakan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan Alun-Alun Kota Serang masih relevan untuk dilanjutkan. Masyarakat masih merasakan manfaat keberadaan kawasan tersebut sebagai ruang publik yang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas sosial.

Meski demikian, keberlanjutan kebijakan perlu disertai dengan berbagai perbaikan pada aspek implementasi. Penguatan regulasi teknis, peningkatan koordinasi antarinstansi, perbaikan fasilitas umum, serta pengawasan yang lebih konsisten menjadi langkah yang perlu dilakukan agar manfaat kebijakan tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat dipertahankan secara berkelanjutan pada masa yang akan datang.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Alun-Alun Kota Serang telah berhasil mewujudkan fungsi sosial sebagai ruang publik yang aktif digunakan masyarakat untuk berbagai aktivitas rekreasi, olahraga, dan interaksi sosial. Namun demikian, fungsi ekologis kawasan belum tercapai secara optimal karena masih ditemukan berbagai persoalan terkait kebersihan, pengawasan, pemeliharaan fasilitas, serta penataan aktivitas di kawasan alun-alun. Berdasarkan tujuan penelitian, evaluasi menggunakan model IPO-O menunjukkan bahwa kelemahan pada dimensi input dan process menjadi faktor utama yang memengaruhi kualitas output dan outcome kebijakan. Meskipun ruang publik telah tersedia dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, implementasi kebijakan belum sepenuhnya mampu mendukung terciptanya keseimbangan antara fungsi sosial dan fungsi ekologis RTH. Oleh karena itu, keputusan evaluatif yang dihasilkan adalah bahwa kebijakan ini masih layak untuk dilanjutkan dan tidak perlu dihentikan. Perbaikan perlu difokuskan pada penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas pengelola, optimalisasi pengawasan kawasan, penataan zonasi aktivitas, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan RTH. Implikasi kebijakan dari penelitian ini menunjukkan

bahwa keberhasilan pengelolaan RTH perkotaan tidak hanya ditentukan oleh tingkat pemanfaatan ruang oleh masyarakat, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga kualitas lingkungan secara berkelanjutan melalui tata kelola yang efektif dan terintegrasi. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan yang relatif terbatas serta belum tersedianya data yang lebih komprehensif untuk mengukur dampak ekologis secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melibatkan informan dari unsur pengelola kebijakan dan menggunakan pendekatan yang lebih luas agar dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai keberlanjutan pengelolaan RTH di kawasan perkotaan.

REFERENSI

Artikel/Jurnal

- Arifin, H. S., & Nakagoshi, N. (2011). Landscape ecology and urban biodiversity in tropical Indonesian cities. *Landscape and ecological engineering*, 7(1), 33-43. <https://doi.org/10.1007/s11355-010-0145-9>
- Chiesura, A. (2004). The role of urban parks for the sustainable city. *Landscape and urban planning*, 68(1), 129-138. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2003.08.003>.
- Hansen, R., Olafsson, A. S., Van Der Jagt, A. P., Rall, E., & Pauleit, S. (2019). Planning multifunctional green infrastructure for compact cities: What is the state of practice?. *Ecological indicators*, 96, 99-110. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.09.042>
- Jennings, V., & Bamkole, O. (2019). The Relationship between Social Cohesion and Urban Green Space: An Avenue for Health Promotion. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(3), 452. <https://doi.org/10.3390/ijerph16030452>
- Kabisch, N., Korn, H., Stadler, J., & Bonn, A. (2017). Nature-Based Solutions To Climate Change Adaptation In Urban Areas—Linkages Between Science, Policy And Practice. In *Nature-Based Solutions To Climate Change Adaptation In Urban Areas: Linkages Between Science, Policy And Practice* (pp. 1-11). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-56091-5_1
- Meerow, S., & Newell, J. P. (2019). Urban resilience for whom, what, when, where, and why? *Urban Geography*, 40(3), 309–329. <https://doi.org/10.1080/02723638.2016.1206395>
- Rahmy, W. A., Faisal, B., & Soeriaatmadja, A. R. (2012). Kebutuhan ruang terbuka hijau kota pada kawasan padat, studi kasus di wilayah Tegallega, Bandung. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 1(1), 27-38.
- Rigolon, A. (2016). A complex landscape of inequity in access to urban parks: A literature review. *Landscape and urban planning*, 153, 160-169. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2016.05.017>

- Putri, S. D., dan Hartini, Y. (2017). Analisis Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau untuk Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(2), 89-98.
- Wolch, J. R., Byrne, J., & Newell, J. P. (2014). Urban green space, public health, and environmental justice: The challenge of making cities 'just green enough'. *Landscape and urban planning*, 125, 234-244. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2014.01.017>
- Xiao, Y., Wang, D., & Fang, J. (2019). Exploring the disparities in park access through mobile phone data: Evidence from Shanghai, China. *Landscape and urban planning*, 181, 80-91. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2018.09.013>

Buku:

- Dunn, W. N. (2003). Introduction to public policy analysis. Yogyakarta, Gajah Mada University.
- Hakim, R., & Utomo, H. (2004). *Komponen Perancangan Arsitektur Lanskap: prinsip-unsur dan aplikasi desain*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nugroho, R dan Wrihatnolo.(2011). *Manajemen Perencanaan Pembangunan*. Media Coputrindo : Jakarta.
- Riswanda. (2024). *Menafsirkan Paradigma Penelitian Kebijakan Publik* (M. Nurhaliza, Ed.). CV Sintesia.
- Riswanda. (2024b). Skenario Kebijakan Resilien Terhadap Ancaman Narkotika: Integrasi Intelijen, Komunitas, dan Reformasi Organisasi.Sintesia. <https://serangkaianbooks.com/share/buku/skenario-kebijakan-resilienterhadap-ancaman-narkotika-integrasi-intelijen-komunitas-dan-reformasiorganisasi>
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita

Dokumen Resmi Pemerintahan:

- Badan Pusat Statistik Kota Serang. (2025). *Data kependudukan Kota Serang 2023–2025*. Badan Pusat Statistik Kota Serang.
- Badan Pusat Statistik Kota Serang. (2025). *Data ruang terbuka hijau (RTH) Kota Serang*. Badan Pusat Statistik Kota Serang.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*.

Laporan Organisasi

- Habitat, U. N. (2020). The value of sustainable urbanization. *World Cities Report*.
- World Health Organization. (2017). Urban green space interventions and health: A review of impacts and effectiveness.

Artikel Berita/Media Online:

- Banten Ekspres. (2025, April 14). *Warga keluhkan RTH di Kota Serang masih minim*. <https://www.bantenekspres.co.id/2025/04/14/warga-keluhkan-rth-di-kota-serang-masih-minim/2/>